

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Teori-teori**

##### **1. Piutang Usaha**

###### **a. Pengertian Piutang Usaha**

Piutang usaha (*account receivable*) timbul akibat adanya penjualan secara kredit agar dapat lebih banyak menjual produk barang dan jasa. Istilah piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Dalam kegiatan perusahaan yang normal, biasanya piutang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sehingga digolongkan dalam aktiva lancar.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (IAI:2012) suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, jika aktiva tersebut :

- 1) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan.
- 2) Dimiliki untuk diperusahakan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca atau
- 3) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Piutang usaha menurut Iwan Setiawan (2010:199) adalah “Segala bentuk tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain yang pelunasannya dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang, maupun jasa”.

Menurut IFRS (International Financial Reporting Standart) IAS 1

(Revised 2009) *Precentation of Financial Statement Account Receivable is amount owed to the company for services performed or products sold but not yet paid for.* Sedangkan Kieso, dkk (2002:256) mendefinisikan piutang sebagai “*Claims held against costumers and other for money, goods, or services.*”

Berdasarkan ketiga pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa piutang adalah klaim atas uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Piutang usaha pada umumnya adalah kategori yang paling signifikan dari piutang dan merupakan hasil dari aktivitas normal perusahaan atau entitas, yaitu penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Piutang usaha dapat diperkuat dengan janji pembayaran tertulis secara formal dan diklasifikasikan sebagai wesel tagih (*notes receivable*). Piutang usaha umumnya merupakan jumlah yang material di neraca bila dibandingkan dengan piutang non usaha.

Piutang non usaha timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar, seperti misalnya piutang kepada karyawan, piutang penjualan saham, piutang klaim asuransi, piutang pengembalian pajak, piutang dividen dan bunga. Piutang non usaha biasanya disajikan secara terpisah. Jika piutang non usaha tersebut diharapkan akan tertagih dalam jangka waktu satu tahun, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihannya lebih dari satu tahun, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan di bawah judul investasi.

Prinsip-prinsip akuntansi piutang usaha menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (IAI:2012) adalah :

- 1) Piutang usaha disajikan dalam neraca sebesar netto, yaitu piutang usaha dikurangi penyisihan kerugian piutang
- 2) Metode penyisihan kerugian piutang usaha harus dijelaskan secukupnya
- 3) Piutang usaha disajikan terpisah dengan piutang lain-lain
- 4) Piutang usaha yang bersaldo kredit disajikan sebagai kewajiban lancar dalam akun uang muka penjualan
- 5) Piutang usaha yang dijadikan jaminan harus dijelaskan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 43 (IAI:2012) tentang akuntansi anjak piutang dijelaskan bahwa pengungkapan piutang yang memadai harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Piutang usaha diakui sebagai kewajiban anjak piutang sebesar nilai piutang yang dialihkan. Selisih antara nilai piutang yang dialihkan dengan dana yang diterima ditambah retensi diakui sebagai beban bunga selama periode anjak piutang.
- 2) Kewajiban anjak piutang disajikan dalam neraca sebesar nilai piutang yang dialihkan dikurangi retensi dan beban bunga yang belum diamortisasi.

#### **b. Akuntansi Piutang Usaha**

Transaksi yang memengaruhi piutang usaha merupakan bagian dari siklus pendapatan. Siklus pendapatan tersebut adalah transaksi penjualan kredit barang dan jasa kepada pelanggan, transaksi retur penjualan, transaksi penerimaan kas dari debitur, dan transaksi penghapusan piutang. Transaksi-transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal sebagai berikut :

- 1) Transaksi penjualan kredit barang dan jasa kepada pelanggan. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah :

Piutang usaha	xxx	
Penjualan		xxx

2) Transaksi retur penjualan. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah :

Retur penjualan	xxx	
Piutang usaha		xxx

3) Transaksi penerimaan kas dari debitur. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah :

Kas	xxx	
Piutang usaha		xxx
Pendapatan bunga		xxx

4) Transaksi penghapusan piutang. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:

Cadangan kerugian piutang	xxx	
Piutang usaha		xxx

### c. Metode Penilaian Piutang Usaha

Pelaporan piutang usaha melibatkan klasifikasi dan penilaian didalam neraca. Klasifikasi melibatkan penentuan lamanya waktu setiap piutang akan beredar. Piutang usaha diperkirakan akan tertagih dalam satu tahun atau siklus operasi tergantung mana yang lebih panjang diklasifikasikan sebagai lancar, sementara semua piutang lainnya diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Piutang usaha ini dilaporkan ke dalam neraca.



Penilaian piutang usaha dinilai dan dilaporkan pada nilai realisasi bersih, jumlah bersih yang diperkirakan akan diterima dalam bentuk kas, yang tidak selalu berupa jumlah yang secara resmi merupakan piutang. Penentuan nilai realisasi bersih memerlukan estimasi atas piutang yang tak tertagih maupun return penjualan dan potongan harga yang diberikan. Dengan demikian, piutang bersih diperoleh dari piutang dikurangi return penjualan dan potongan harga yang diberikan perusahaan kepada debitur, menurut Hermawan (2012:32), “Pencatatan untuk kerugian piutang usaha dapat dilakukan dengan dua metode yaitu a) metode penghapusan langsung, dan b) metode penghapusan tidak langsung”.

1) Metode penghapusan langsung

Pada penggunaan metode ini ketika piutang usaha benar-benar tidak dapat ditagih lagi, maka kerugian piutang usaha didebit dan rekening piutang usaha dikredit. Berikut disajikan contoh: PT. Astragraphia memiliki piutang usaha kepada PT. X sebesar Rp 5.000.000,- pada tanggal 26 maret 2010, manajemen PT. Astragraphia memutuskan untuk menghapus piutang tersebut karena diketahui PT.X telah bangkrut atau ditutup, maka jurnal yang dibuat adalah:

Kerugian piutang usaha	Rp 5.000.000,-
------------------------	----------------

Piutang usaha	Rp 5.000.000,-
---------------	----------------

Penggunaan metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode ini perusahaan dapat mengetahui kapan piutang usaha benar-benar tidak dapat ditagih. Kekurangan metode ini adalah

apabila jumlah yang dihapus pada periode penghapusan piutang memiliki nilai yang besar sehingga jumlah laba menjadi tidak stabil dengan periode-periode sebelumnya.

2) Metode penghapusan tidak langsung

Metode ini, perusahaan dituntut untuk menghitung taksiran kerugian piutang setiap akhir tahun. Penentuan taksiran kerugian piutang didasarkan pada pengalaman tahun sebelumnya. Penggunaan metode ini sesuai dengan prinsip penandingan, dimana biaya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dikaitkan dengan pendapatan pada periode berjalan dimana pendapatan diakui. Artinya biaya kerugian piutang diakui periode dimana terjadi penjualan, bukan dalam periode terjadinya penghapusan sesungguhnya. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dengan metode cadangan ini yakni:

- a) Kerugian piutang tak tertagih diakui sebagai beban, yang akan dikaitkan dengan penjualan pada periode berjalan.
- b) Jumlah piutang yang ditaksir tak tertagih dicatat dengan menerbitkan rekening beban kerugian piutang dan mengkredit rekening cadangan kerugian piutang. Rekening beban kerugian piutang akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dan rekening cadangan kerugian piutang akan dilaporkan di neraca.
- c) Apabila terjadi kerugian piutang maka akan mencatat dengan mendebit cadangan kerugian piutang dan mengkredit piutang usaha.

Pada tanggal 31 maret 2010, pihak manajemen perusahaan menetapkan bahwa piutang yang ada pada PT. Cahaya sebesar Rp 2.000.000,- tidak dapat dikembalikan atau dihapus dari daftar piutang. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat penghapusan piutang tersebut adalah:

Beban kerugian piutang                      Rp 2.000.000,-

    Piutang usaha                                      Rp 2.000.000,-

Menurut Hermawan (2012:32), “Dasar penetapan estimasi piutang tak tertagih dapat dilakukan dengan 1) persentase jumlah penjualan 2) persentase jumlah piutang, dan 3) analisis umur piutang”.

1) Persentase jumlah penjualan

Penetapan dasar ini ditetapkan melalui persentase jumlah penjualan kredit atau penjualan bersih pada tahun berjalan. Penetapan jumlah persentase didasarkan pada pengalaman pada tahun sebelumnya.

2) Persentase jumlah piutang

Penggunaan dasar persentase jumlah piutang ditetapkan melalui persentase jumlah piutang usaha pada neraca saldo yang belum disesuaikan. Misalnya pada tahun 2011, saldo piutang PT. Dahlia sebesar Rp 58.000.000,- dan piutang netto Rp 46.000.000,-. Apabila ditetapkan jumlah yang tidak tertagih sebesar 2,5%, maka bila ditetapkan dari persentase piutang bruto:

$$2,5\% \times \text{Rp } 58.000.000,- = \text{Rp } 1.450.000,-$$

Jurnal penyesuaian yang diperlukan adalah:

Beban kerugian piutang	Rp 1.450.000,-	
Cadangan kerugian piutang		Rp 1.450.000,-

Bila ditetapkan dari persentase piutang netto:

$$2,5\% \times 46.000.000,- = \text{Rp } 1.150.000,-$$

Jurnal penyesuaian yang diperlukan adalah:

Beban kerugian piutang	Rp 1.150.000,-	
Cadangan kerugian piutang		Rp 1.150.000,-

### 3) Analisis umur piutang

Semakin lama piutang beredar akan semakin lama piutang tersebut kembali. Berarti estimasi persentase piutang tak tertagih dapat didasarkan pada waktu peredaran piutang. Semakin lama, maka semakin besar persentasenya kemungkinan piutang tersebut tidak tertagih. Untuk tujuan tersebut maka perusahaan dapat membuat analisis umur piutang. Kerugian piutang dilaporkan sebagai beban kerugian piutang tak tertagih di laporan laba rugi.

#### d. Menghitung dan Menginterpretasikan Perputaran Piutang Usaha

Perputaran piutang usaha merupakan perbandingan antara jumlah penjualan kredit selama periode tertentu dengan piutang rata-rata (piutang awal ditambah piutang akhir dibagi dua). Tinggi rendahnya perputaran piutang usaha (*receivable turnover*) mempunyai efek yang langsung terhadap besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang. Semakin tinggi *turnover*-nya berarti semakin cepat perputaran piutangnya,



sebaliknya semakin rendah *turnover*-nya berarti semakin lambat perputaran piutangnya.

Munawir (2004:75) mengemukakan bahwa “Makin tinggi perputaran menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah, sebaliknya kalau rasio semakin rendah berarti ada kelebihan investasi dalam piutang sehingga memerlukan analisa lebih lanjut, mungkin karna bagian kredit dan penagihan bekerja tidak efektif atau mungkin ada perubahan dalam kebijakan pemberian kredit”.

#### 1) Perputaran Piutang Usaha

Berikut adalah rumus perputaran piutang usaha (*receivable turnover*) sebagai berikut :

$$\text{receivable turnover} = \frac{\text{Net credit Sales}}{\text{Average Receivable}}$$

#### 2) Jangka Waktu Pengumpulan Piutang Usaha

Jangka waktu pengumpulan piutang usaha dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata periode pengumpulan piutang} = \frac{365}{\text{Perputaran Piutang}}$$

#### 3) Piutang Usaha Terhadap Total Aktiva

Dihitung dengan membandingkan antara tingkat piutang selama setahun dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan selama periode.

#### 4) Piutang Usaha Terhadap Penjualan

Dalam hal ini piutang yang relatif lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya dapat berarti semakin tinggi resiko terjadinya piutang tak tertagih.

Semakin lama jangka waktu piutang usaha, resiko tidak tertagihnya semakin besar. Walaupun demikian, jangka waktu piutang yang lebih lama dapat dibenarkan karena jangka waktu kredit dapat dilonggarkan, misalnya untuk pengenalan produk baru atau apabila tingkat penjualan yang direncanakan pada periode berjalan belum tercapai. Piutang usaha dinilai sebesar jumlah yang diterima untuk masa yang akan datang. Jumlah ini belum tentu sama dengan jumlah uang yang tercantum dalam piutang. Piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dibebankan sebagai biaya.

## **2. Pengendalian Internal**

### **a. Pengertian Pengendalian Internal**

Pengendalian internal merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian internal. Sawyers (2005:58) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan yang wajar tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :

- 1) Keandalan pelaporan keuangan
- 2) Efektivitas dan efisiensi operasi
- 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Menurut Hery (2011:87) sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan

sasarannya. Manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi serta ketaatan pada hukum dan peraturan.

Sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2006:167) meliputi “Struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal pada hakikatnya adalah suatu mekanisme yang didesain untuk menjaga (*preventif*), mendeteksi (*detektif*), dan memberikan mekanisme pembetulan (*korektif*) terhadap potensi terjadinya kesalahan (kekeliruan, kelalaian, *error*) maupun penyalahgunaan (kecurangan, *fraud*)”.

Menurut Mc Leod dan George (2008:67) yang diterjemahkan oleh Ali Akbar dan Afia Fitriani, pengendalian internal dapat dibedakan dalam berbagai sudut pandang, yaitu :

- 1) *Preventif controls*, yaitu pengendalian internal yang dirancang dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dan penyalahgunaan. Contoh jenis pengendalian ini ialah desain formulir yang baik, itemnya lengkap, mudah diisi, serta *user training* atau pelatihan kepada orang-orang yang berkaitan dengan input sistem, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan.
- 2) *Detection control*, adalah pengendalian yang didesain dengan tujuan agar apabila data direkam/dikonversi dari media sumber untuk ditransfer ke sistem computer dideteksi bila terjadi kesalahan (maksudnya tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan). Contoh jenis pengendalian ini adalah misalnya jika seseorang mengambil uang di atm, maka seharusnya program computer mendeteksi jika dana tidak cukup, atau saldo minimum tidak mencukupi, atau melebihi jumlah maksimal yang diijinkan untuk pengambilan tiap harinya.
- 3) *Corrective control*, ialah pengendalian yang sifatnya jika terdapat data yang sebenarnya *error* tetapi tidak terdeteksi oleh *detection control*, atau data yang *error* yang terdeteksi oleh program validasi, harus ada prosedur yang jelas tentang bagaimana melakukan pembetulan terhadap data yang salah dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan kerugian kalau kesalahan/penyalahgunaan tersebut sudah benar-benar terjadi.

## b. Prinsip Dasar Pengendalian Internal

Menurut Sanyoto (2007:250), ada beberapa asumsi dasar yang perlu dipahami mengenai pengendalian internal bagi suatu entitas organisasi atau perusahaan :

- 1) Sistem pengendalian internal merupakan *management responsibility*. Bahwa sesungguhnya yang paling berkepentingan terhadap sistem pengendalian internal suatu entitas organisasi/perusahaan adalah manajemen, lebih tegasnya lagi adalah top manajemen/direksi), karena dengan sistem pengendalian internal yang baik itulah top manajemen dapat mengharapkan kebijakannya dipatuhi, aktiva atau harta perusahaan dilindungi, dan penyelenggaraan pencatatan berjalan baik.
- 2) Top manajemen bertanggung jawab menyusun sistem pengendalian internal, tentu saja dilaksanakan oleh para stafnya. Dalam penyusunan tim yang akan ditugaskan untuk merancang sistem pengendalian internal, harus dipilih anggotanya dari para ahli, termasuk yang berkaitan dengan teknologi informasi (mengingat saat ini sistem lazimnya dibuat berbasis teknologi informasi).
- 3) Sistem pengendalian internal seharusnya bersifat *generic*, mendasar, dan dapat diterapkan pada semua perusahaan pada umumnya (tidak boleh jika hanya berlaku untuk satu perusahaan saja, melainkan harus ada hal-hal yang bersifat dasar yang berlaku umum).
- 4) Sifat sistem pengendalian internal adalah *reasonable assurance*, artinya tingkat rancangan yang kita desain adalah yang paling optimal. Sistem pengendalian internal yang paling baik ialah bukan yang paling maksimal, apalagi harus dipertimbangkan *cost benefitnya*.
- 5) Sistem pengendalian internal mempunyai keterbatasan-keterbatasan atau *constraints*, misalnya adalah sebaik-baik control tetapi kalau para pegawai yang melaksanakannya tidak cakap, atau kolusi, maka tujuan pengendalian internal itu mungkin tidak tercapai.
- 6) Sistem pengendalian internal harus selalu dan terus menerus dievaluasi, diperbaiki, disesuaikan, dengan perkembangan kondisi dan teknologi.

Menurut Alvin (2001:290), terdapat empat konsep dasar yang mendasari telaah atas struktur pengendalian internal dan penetapan risiko pengendalian, diantaranya tanggung jawab manajemen, kepastian yang wajar, keterbatasan yang melekat (*inherent*), dan metode pengendalian data.



1) Tanggung jawab manajemen

Manajemen, dan bukan auditor yang harus menyusun dan memonitor struktur pengendalian internalnya. Konsep ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa manajemen, dan bukan auditor yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

2) Kepastian yang wajar

Suatu perusahaan harus mengusahakan struktur pengendalian internal yang memberikan kepastian yang wajar tetapi bukan mutlak, bahwa laporan keuangannya telah disajikan dengan wajar. Struktur pengendalian internal disusun oleh manajemen setelah mempertimbangkan baik biaya maupun manfaat pengendalian tersebut. Seringkali, manajemen enggan untuk menerapkan sistem pengendalian yang ideal karena biayanya mungkin terlalu tinggi. Sebagai contoh, auditor tidak selayaknya mengharapkan manajemen dari perusahaan kecil untuk mempekerjakan beberapa personil tambahan pada bagian akuntansi bila hanya untuk perbaikan kecil saja pada penyediaan data akuntansi yang lebih terhandalkan. Adakalanya, jauh lebih murah jika auditor menyelenggarakan pemeriksaan yang lebih luas daripada harus mengeluarkan biaya pengendalian internal yang tinggi.

3) Keterbatasan yang melekat (*inhern*)

Struktur pengendalian internal tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, meskipun telah dirancang dan disusun dengan sebaik-baiknya.

Bahkan, meskipun sistem yang ideal telah dirancang, keberhasilannya tetap bergantung pada kompetensi dan kehandalan oleh pelaksananya. Sebagai contoh, misalkan prosedur penghitungan persediaan telah disusun dengan seksama dan dibutuhkan dua orang karyawan yang harus menghitung secara terpisah. Apabila kedua karyawan yang bertugas tidak memahami petunjuk-petunjuk yang mereka terima, atau keduanya bekerja ceroboh, penghitungan persediaan itupun cenderung tidak benar. Bahkan apabila hasil penghitungan itu benar, manajemen mungkin mengabaikan prosedurnya dan memerintahkan karyawannya untuk menaikkan jumlah perhitungan barang-barang yang telah dibuat, untuk menaikkan laba yang dilaporkan. Sama halnya bila karyawan yang bersangkutan, mungkin dengan sengaja menaikkan jumlah perhitungannya untuk menutupi pencurian barang-barang tersebut oleh salah seorang atau keduanya. Inilah yang disebut persekongkolan (*collusion*). Karena keterbatasan yang melekat pada struktur pengendalian tersebut dan arena auditor tidak dapat mengharapkan kepastian yang wajar dari keefektifannya, maka kepercayaan tidak dapat sepenuhnya diletakkan pada beberapa tingkat risiko pengendalian. Karena itu, untuk merancang sistem pengendalian internal yang efektif, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dalam menguji pengendalian internal. Selalu ada kemungkinan bahwa sistem pengendalian tidak dapat melacak seluruh kesalahan yang material.

#### 4) Metode pengolahan data

Konsep pengendalian internal berlaku sama dengan sistem maupun manual komputerisasi (EDP). Terdapat perbedaan besar antara sistem manual yang sederhana bagi sebuah perusahaan kecil dan sistem EDP yang sangat rumit untuk perusahaan industri bertaraf internasional. Meskipun demikian, tujuan pengendalian internal adalah sama.

#### c. Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) (Moeller 2009:25) adalah :

- a. *To provide reliable data, included :*
  1. *Completeness, input/process/output*
  2. *Accuracy, input/process/output*
  3. *Uniqueness*
  4. *Reasonableness*
  5. *Errors are detected*
- b. *To encourage adherence to prescribed accounting policies, included:*
  1. *Timeliness : captured/enter/process*
  2. *Valuation : calculation, summary, etc*
  3. *Classification*
- c. *To safeguard assets and records, included :*
  1. *Transaction authorized*
  2. *Distribution of output*
  3. *Validity, no nonvalid data processed*
  4. *Security of data and records*

Tujuan pertama dirancangnya pengendalian internal dari segi pandang manajemen ialah untuk dapat diperolehnya data yang dapat dipercaya, yaitu data yang lengkap, akurat, unik, *reasonable*, dan kesalahan-kesalahan data dideteksi. Tujuan berikutnya adalah dipatuhinya kebijakan akuntansi, yang akan dicapai jika data diolah tepat waktu, penilaian, klasifikasi dan pisah batas waktu transaksi akuntansi tepat.

Tujuan selanjutnya ialah pengamanan asset, yaitu dengan adanya *otorisasi*, *distribusi output*, data valid dan diolah serta disimpan secara aman.

Tujuan dirancangnya sistem pengendalian internal dari cara pandang terkini dan yang sudah mencakup lingkup yang lebih luas pada hakekatnya adalah untuk melindungi harta milik perusahaan, mendorong kecermatan dan kehandalan data dan pelaporan akuntansi, meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan dan aturan-aturan yang ada.

1) Pencatatan

Pengolahan data dan penyajian informasi yang dapat dipercaya pimpinan hendaklah memiliki informasi yang benar/tepat dalam rangka melaksanakan kegiatannya. Mengingat bahwa berbagai jenis informasi digunakan untuk bahan mengambil keputusan sangat penting artinya, karena itu suatu mekanisme atau sistem yang dapat mendukung penyajian informasi yang akurat sangat diperlukan oleh pimpinan perusahaan.

2) Mengamankan aktiva perusahaan

Pengamanan atas berbagai harta benda termasuk catatan pembukuan/file/*database* semakin penting dengan adanya computer. Data/informasi yang begitu banyaknya yang disimpan di dalam media computer seperti disket dan *USB* dapat dirusak apabila tidak diperhatikan pengamanannya.



3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional

Pengawasan dalam suatu organisasi merupakan alat untuk mencegah penyimpangan tujuan/rencana organisasi, menghindari pemborosan dalam setiap segi perusahaan dan mengurangi setiap jenis penggunaan sumber-sumber yang ada secara tidak efisien.

4) Mendorong pelaksanaan kebijakan dan peraturan

Manajemen menyusun kebijakan dan peraturan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian internal berarti memberikan jaminan yang layak bahwa kesemuanya itu telah dilaksanakan oleh karyawan perusahaan.

Tujuan pengendalian internal harus dilihat hubungannya dengan orang/individu yang menjalankan sistem pengendalian tersebut. Sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga para pegawai dapat merasakannya sendiri dan yakin bahwa pengendalian internal bertujuan mengurangi kesulitan-kesulitan dalam operasi organisasi, melindungi organisasi, merupakan persyaratan dalam upaya tercapainya tujuan, dan dengan demikian mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah digariskan.

Suatu pengendalian internal yang baik dalam perusahaan akan memberikan keuntungan yang sangat berarti bagi perusahaan itu sendiri, karena :

- 1) Dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi, sehingga akan menghasilkan laporan yang benar.

- 2) Melindungi atau membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan penggelapan-penggelapan
- 3) Kegiatan organisasi akan dapat dilaksanakan dengan efisien.
- 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan.
- 5) Tidak memerlukan detail audit dalam bentuk pengujian *substantif* atas bahan bukti/data perusahaan yang cukup besar oleh akuntan publik.

Jika sistem pengendalian internal suatu perusahaan cukup baik dan auditor cukup puas dalam melakukan *test of control*, maka pengujian *substantif* dapat dilakukan dengan sekecil mungkin jumlah bukti/data dari suatu teknik sampling. Dengan demikian, kegiatan audit tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Tujuan didesainnya sistem pengendalian internal khusus (atau tambahan) bagi sistem berbasis computer adalah untuk membantu manajemen dalam mencapai pengendalian internal menyeluruh, termasuk kegiatan manual di dalamnya, kegiatan dengan alat mekanis, maupun yang terkait dengan pemrosesan data berbasis computer (teknologi informasi). Sistem pengendalian tersebut dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain/karyawan perusahaan atau seluruh anggota suatu organisasi, dan didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian-pencapaian tujuan di atas.

Berbagai jenis transaksi dalam sistem informasi akuntansi, jenis kesalahan pencatatan dapat terjadi. Sebagai contoh, transaksi pembayaran upah/gaji dapat terjadi kesalahan kalau jam kerja yang salah dibebankan

ke dalam kartu pencatat waktu atau pembayaran gaji bruto didebet ke dalam nomor perkiraan yang salah dalam jumlah pembayaran gaji.

Prosedur pencatatan transaksi menurut Sanyoto (2007:262) :

- 1) Setiap transaksi yang dicatat adalah sah (validitas). Suatu sistem tidak dapat memberikan transaksi-transaksi fiktif dan yang sebenarnya tidak terjadi dalam jurnal atau catatan akuntansi lainnya.
- 2) Setiap transaksi diotorisasikan dengan tepat (otorisasi). Kalau transaksi yang tidak dapat diotorisasi terjadi, hal ini dapat mengakibatkan adanya transaksi yang curang, dan juga dapat mengakibatkan pemborosan atau pengrusakan terhadap aktiva perusahaan.
- 3) Setiap transaksi yang terjadi dicatat (kelengkapan). Setiap prosedur yang dimiliki klien harus memberikan pengendalian untuk mencegah penghilangan setiap transaksi dari catatan.
- 4) Setiap transaksi dinilai dengan tepat (penilaian). Sistem yang memadai selalu disertai dengan prosedur untuk menghindari kesalahan dalam penghitungan dan *recording* tiap transaksi pada berbagai langkahlangkah proses pencatatan.
- 5) Setiap transaksi diklasifikasikan dengan tepat (klasifikasi). Klasifikasi akun/perkiraan yang tepat, sesuai dengan kode perkiraan klien, harus ditetapkan dalam jurnal kalau laporan keuangannya dinyatakan dengan tepat. Klasifikasi ini juga mencakup berbagai kategori seperti divisi dan hasil produk.
- 6) Setiap transaksi dicatat pada waktu yang tepat (ketetapan waktu). Pencatatan setiap transaksi baik sebelum atau sesudah saat terjadinya, selalu menimbulkan kemungkinan adanya kelalaian untuk mencatatnya atau pencatatannya terjadi pada akhir periode maka laporan keuangan akan mengandung kesalahan.
- 7) Setiap transaksi dimasukkan dengan tepat ke dalam catatan tambahan dan diikhtisarkan dengan benar posting & ikhtisar. Dalam beberapa keadaan, masing-masing transaksi diikhtisarkan (dirangkum menjadi satu) dan dijumlahkan sebelum dicatat ke dalam jurnal yang bersangkutan. Lalu jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar, dan buku besar tersebut diikhtisarkan lagi dan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Selain metode yang digunakan untuk memasukkan setiap transaksi ke dalam catatan tambahan selalu dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengikhtisaran tersebut adalah benar.

#### **d. Keterbatasan Pengendalian Internal**

Perlu diingat bahwa sistem pengendalian internal yang terbaik adalah bukan struktur pengendalian yang seketat mungkin secara

maksimal, sistem pengendalian internal juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Menurut Boynton, dkk (2002:376) keterbatasan atau kelemahan yang melekat pada sistem pengendalian internal antara lain :

- 1) Kesalahan dalam pertimbangan  
Kadang-kadang, manajemen dan personel lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena prosedur lainnya.
- 2) Kemacetan  
Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi karena personel salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perubahan sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya kemacetan.
- 3) Kolusi  
Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian internal (misalnya, kolusi antara tiga karyawan mulai dari departemen personel, manufaktur, dan penggajian untuk membuat pembayaran kepada karyawan fiktif, atau skedul pembayaran kembali antara seorang karyawan dalam departemen pembelian dan pemasok atau antara seorang karyawan di departemen penjualan dengan pelanggan).
- 4) Penolakan manajemen  
Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan (misalnya, menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran bonus atau nilai pasar dari saham entitas, atau menyembunyikan pelanggaran dari perjanjian hutang atau ketidaktaatan terhadap hukum dan peraturan). Praktik penolakan (*override*) termasuk membuat penyajian salah dengan sengaja kepada auditor dan lainnya seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif.
- 5) Biaya versus manfaat  
Biaya pengendalian internal suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Karena pengukuran yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan, manajemen harus membuat baik estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat.

Menurut Hery (2011:103) Faktor manusia adalah faktor yang penting sekali dalam setiap pelaksanaan sistem pengendalian internal.



Sebuah sistem pengendalian internal yang baik akan dapat menjadi tidak efektif oleh karena adanya karyawan yang kelelahan, ceroboh, atau bersikap acuh tak acuh. Demikian juga halnya dengan kolusi, dimana kolusi ini akan dapat secara signifikan mengurangi keefektifan sebuah sistem dan mengeliminasi proteksi yang ditawarkan dari pemisahan tugas. Belum lagi adanya sebuah pandangan umum yang mengatakan bahwa pada prinsipnya di dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna, termasuk sistem pengendalian internal yang dijalankan perusahaan.

### 3. Pengendalian Internal Piutang Usaha Menurut COSO

Suatu komite yang diorganisir oleh lima organisasi profesi yaitu IIA, AICPA, IMA, FEI, dan AAA pada bulan oktober 1987 menghasilkan kajian yang dinamakan *COSO framework of internal control*. Pada tahun 1992 COSO mengeluarkan definisi tentang pengendalian internal, COSO memandang pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang menembus seluruh organisasi. COSO juga membuat jelas bahwa pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring (Boynton 2003:379).

Terdapat lima komponen pengendalian internal menurut COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penentuan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan atau pemantauan.

#### 1) Lingkungan pengendalian

Komponen ini meliputi sikap manajemen disemua tingkatan terhadap operasi secara umum dan konsep pengendalian secara khusus. Hal ini mencakup etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi, juga tercakup struktur organisasi serta kebijakan dan filosofi manajemen. Kode etik merupakan upaya yang dapat dilakukan

oleh entitas atau perusahaan dalam mendorong efektifnya pengendalian internal. Kode etik merupakan standar aturan mengenai etika yang harus dijalankan oleh entitas. Implementasi dari kode etik ini akan sangat efektif jika memenuhi dua syarat, yaitu pertama, entitas perlu menyatakan secara spesifik kepada karyawan mengenai kode etik yang mereka jalankan. Syarat kedua, agar kode etik ini bisa berjalan secara efektif adalah perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak. Tanpa ada dukungan dari manajemen puncak, kode etik ini akan sulit untuk diimplementasikan. Kompetensi adalah skill atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang sebagai modal dalam melaksanakan tugas atau kewajiban serta kemampuan bersaing dalam mencapai tujuan. Integritas adalah suatu sikap dalam menyatakan keinginan atau kehendak, kejujuran dan keikhlasan serta perbuatan antara orang-orang yang memiliki satu tujuan yang sama. Kompetensi dan integritas merupakan dua sikap yang harus dimiliki oleh setiap personil dalam suatu entitas. Tanpa kedua sikap tersebut, perusahaan akan sangat sulit mencapai tujuannya.

## 2) Penentuan risiko

Penentuan risiko merupakan hal yang penting bagi manajemen. Penentuan risiko mencakup penentuan risiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko. COSO juga menambahkan pertimbangan tujuan di semua bidang operasi untuk memastikan bahwa semua bagian operasi bekerja secara harmonis. Komponen ini telah menjadi bagian dari aktivitas audit internal.

Penentuan risiko merupakan tanggung jawab yang tidak terpisahkan (integral) dan terus menerus dari manajemen. Dikatakan integral, karena manajemen tidak dapat menetapkan tujuan dan dengan mudah mengasumsikan bahwa tujuan tersebut akan tercapai. Banyak hambatan atau risiko yang datang, baik dari dalam maupun dari luar entitas. Risiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para pelanggan. Sebelum perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan atau penambahan kredit oleh para pelanggan, perlulah mengadakan evaluasi risiko kredit dari para pelanggan tersebut. Menilai risiko kredit, *credit manager* harus mempertimbangkan berbagai faktor yang menentukan besar kecilnya kredit tersebut. Pada umumnya bank atau perusahaan dalam mengadakan penilaian risiko kredit terhadap debitur adalah dengan memerhatikan lima “C”. lima “C” tersebut adalah *character, capacity, collateral, capital* dan *conditions*. *Character*, menunjukkan kemungkinan atau profitabilitas dari pelanggan untuk secara jujur memenuhi kewajibannya. Faktor ini sangat penting, karena setiap transaksi kredit mengandung kesanggupan untuk membayar. *Capacity*, adalah pendapat subyek mengenai kemampuan dari pelanggan, ini diukur dengan *record* diwaktu yang lalu, disertai dengan observasi fisik (*survey*) pada rumah dan kantor maupun usaha dari calon debitur. *Capital*, diukur oleh posisi *financial* pelanggan secara umum, dimana hal ini ditunjukkan oleh analisa *ratio financial*, yang khususnya ditekankan “*tangible net worth*” dari perusahaan. *Collateral*, dicerminkan oleh aktiva dari

langganan yang diikatkan, atau dijadikan jaminan bagi keamanan kredit yang diberikan kepada pelanggan tersebut. *Condition*, menunjukkan pengaruh langsung dari *trend* ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan atau perkembangan khusus dalam suatu bidang ekonomi tertentu yang mungkin mempunyai efek terhadap kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diuraikan berbagai faktor yang harus diperhatikan dalam penilaian risiko kredit, maka selanjutnya perlu bagi perusahaan untuk mengambil langkah-langkah tertentu di dalam usaha untuk memperkecil risiko tidak terbayarnya piutang dengan mengadakan penyaringan atau seleksi terhadap para pelanggan atau debitur.

### **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu tentang rasio perputaran modal (Receivable turn over) telah dilakukan oleh beberapa peneliti. A. Musliha M (2009) melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian piutang dalam mengurangi jumlah piutang tak tertagih (Bad debt) perusahaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi penagihan piutang. Musliha juga menggunakan Rasio keuangan yang berhubungan dengan piutang yaitu Rasio Perputaran Piutang (Receivable turn over-RTO), Umur Rata-rata piutang (Average Collection Period), Rasio tunggakan, dan Rasio Penagihan. Hasil dari penelitian Musliha tersebut menunjukkan bahwa sudah optimal dalam menerapkan sistem pengendalian piutang untuk mengurangi jumlah piutang yang tidak tertagih.



Ria Agustina (2009) melakukan penelitian untuk menganalisis kinerja manajemen piutang, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang, keefektifan pengelolaan manajemen piutang. Ria Agustina menggunakan beberapa alat analisis (1) Analisis 5c, Analisis Rasio Keuangan, Analisis Horizontal dan Vertikal, analisis investasi piutang. (2) Analisis Deskripsi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. (3) Analisis umur piutang (ACP) untuk keefektifan pengelolaan manajemen piutang. Hasil dari penelitian Ria Agustina menunjukkan bahwa pengelolaan piutang kurang baik, tergambar pada hasil analisis rasio keuangan.

Dian Hartati (2009) dalam penelitiannya menggunakan uji kualitatif terhadap kuesioner pengendalian internal piutang usaha yang mengacu pada kerangka kerja COSO pada unsur-unsur pengendalian internal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari unsur-unsur pengendalian internal menurut kerangka kerja COSO, unsur penentuan resiko, dan unsur aktivitas pengendalian kurang efektif, sedangkan unsur lingkungan pengendalian, unsur informasi dan komunikasi, serta unsur pengawasan atau pemantauan telah efektif.

Dhahiri Hagyar Siwi (2010) melakukan penelitian untuk mengetahui gambaran praktek manajemen piutang, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang serta menganalisis pengaruh manajemen piutang terhadap stabilitas arus kas dan likuiditas perusahaan secara parsial maupun secara bersamaan. Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Rasio Perputaran Piutang (ARTO) dengan kas dan antara Rasio Periode Penagihan Rata-rata (ACP) dengan kas.

Sedangkan antara Investasi Piutang (IP) dengan kas terdapat pengaruh secara signifikan. Serta tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ARTO dengan likuiditas dan antara ACP dengan likuiditas sedangkan antara IP dengan likuiditas terdapat pengaruh secara signifikan. Secara bersamaan, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa manajemen piutang tidak berpengaruh terhadap kas akan tetapi manajemen piutang terdapat pengaruh terhadap likuiditas pada PT."X".

Ilham (2011) melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian dan prosedur pengelolaan piutang, serta menganalisis kebijakan pengelolaan piutang sehingga dapat mengurangi jumlah piutang tak tertagih (bad debt). Ilham menggunakan beberapa rasio sebagai analisis yaitu receivable turn over (RTO), Average Collection Period (ACP), Rasio Penagihan dan Rasio tunggakan. Hasil dari penelitian ilham tersebut menunjukkan bahwa kurang optimalnya dan efektif dalam mengelola dan mengendalikan piutang usaha.

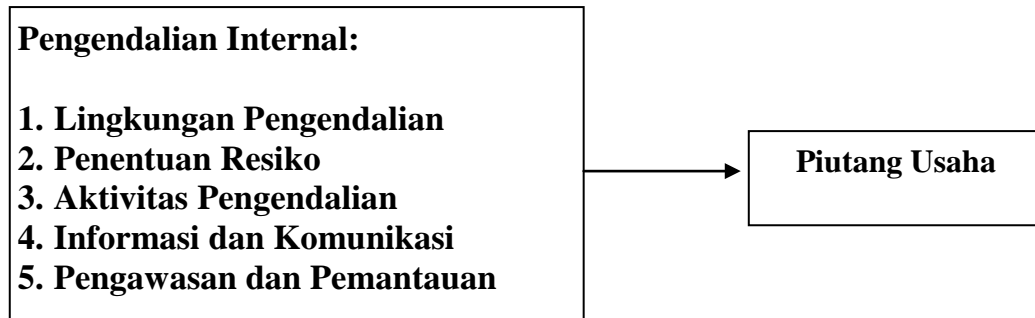
**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel/Metode Analisis	Hasil Temuan
1.	A. Musliha M. (2009)	Analisis sistem pengendalian piutang pada PT. PLN (Persero) wilayah Sultan Batara Cab. Makassar	RTO, ACP, Rasio Tunggakan, Rasio Penagihan	Bahwa sudah optimal dalam menerapkan sistem pengendalian piutang untuk mengurangi jumlah piutang yang tidak tertagih.
2.	Ria Agustina (2009)	Analisis Efektivitas Manajemen Piutang pada PT.Unitex,Tbk.	Rasio Keuangan, Analisis Horizontal dan Vertikal, Analisis Deskripsi, Analisis umur Piutang (ACP)	Bahwa pengelolaan piutang kurang baik, tergambar pada hasil analisis rasio keuangan.
3.	Dian Hartati (2009)	Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha pada PT. SFI Medan	Uji kualitatif terhadap pengendalian internal piutang usaha.	Bahwa unsur pengendalian internal aktivitas pengendalian kurang efektif, sedangkan unsur lingkungan pengendalian, informasi,komunikasi,serta unsur pengawasan telah efektif.
4.	Dhahiri Hagyar Siwi (2010)	Analisis pengaruh manajemen piutang terhadap stabilitas arus kas dan likuiditas perusahaan pada PT. X	RTO, ACP, IP (Investasi Piutang)	bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Rasio Perputaran Piutang (RTO) dengan kas dan antara Rasio

				Periode Penagihan Rata-rata (ACP) dengan kas. Sedangkan antara Investasi Piutang (IP) dengan kas terdapat pengaruh secara signifikan. Serta tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara RTO dengan likuiditas dan antara ACP dengan likuiditas sedangkan antara IP dengan likuiditas terdapat pengaruh secara signifikan. Secara bersamaan, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa manajemen piutang tidak berpengaruh terhadap kas akan tetapi manajemen piutang terdapat pengaruh terhadap likuiditas pada PT. "X".
5.	Ilham (2011)	Analisis sistem pengendalian dan Efektivitas pengelolaan piutang pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cab. Makassar	RTO, ACP, Rasio Tunggakan, Rasio Penagihan	Bahwa kurang optimalnya dan efektif dalam mengelola dan mengendalikan piutang usaha.

### C. Kerangka Pemikiran

PT.Astra International, Tbk (Auto 2000) Cabang Gatot Subroto Medan adalah pembiayaan kredit mobil baru dan mobil bekas sehingga menyebabkan jumlah piutang usaha tinggi. Piutang usaha tersebut harus berjalan lancar, dalam hal ini dapat ditagih sesuai dengan jangka waktunya. Agar hal ini dapat berjalan lancar, maka pengendalian internal terhadap piutang usaha harus dikelola dengan baik. Kerangka pemikiran di bawah ini menggambarkan bahwa pengelolaan piutang usaha dilakukan melalui pengendalian internal terhadap piutang usaha dengan mengacu pada model COSO, sehingga diharapkan dengan adanya pengendalian internal dapat meningkatkan kinerja perusahaan.



Gambar II.1 Kerangka Konseptual

